

STRATEGI KOMUNIKASI PARTISIPATIF SUKARELAWAN PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKAMPUNGAN SOSIAL PINGIT YOGYAKARTA

Theresia Verani Peregrina¹, Chatia Hastasari²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta
theresiaverani.2022@student.uny.ac.id¹, chatia@uny.ac.id²

Submitted: 1 Juli 2026,

Accepted: 20 Juli 2026,

Published: 30 Juli 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi partisipatif sukarelawan dalam program pemberdayaan masyarakat di Perkampungan Sosial Pingit (PSP), Yogyakarta, sebuah entitas pelayanan sosial berbasis komunitas yang telah bertahan hampir enam dekade tanpa ditopang struktur program formal maupun pendanaan tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal instrumental. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur mendalam terhadap enam narasumber yang meliputi sukarelawan, frater pendamping, dan warga dampingan, dilengkapi observasi nonpartisipan serta studi dokumen pada akun Instagram @pingit_berbagi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data mengikuti tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori komunikasi partisipatif Servaes (2002) dan model lingkaran perencanaan komunikasi Cangara (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi sukarelawan PSP secara konsisten memenuhi empat indikator komunikasi partisipatif, yaitu heteroglasia yang diwujudkan melalui penyesuaian peran komunikator terhadap keberagaman komunitas; dialogis yang dibangun melalui kehadiran proaktif dan rutin sebagai fondasi kepercayaan; poliponi yang terwujud dalam musyawarah mingguan yang mengakomodasi berbagai suara tanpa menyeragamkannya; dan karnaval yang menciptakan ruang partisipasi informal dan menyenangkan bagi anak-anak maupun warga dewasa. Selain itu, ditemukan bahwa keempat indikator tersebut ditopang oleh kerangka pedagogi Ignatian, yaitu preparasi, aksi, dan evaluasi/refleksi, yang secara struktural selaras dengan keenam tahap model lingkaran perencanaan komunikasi Cangara, dengan evaluasi formatif mingguan sebagai penggerak utama keberlanjutan siklus komunikasi partisipatif tersebut.

Kata Kunci: Komunikasi partisipatif; pedagogi Ignatian; pemberdayaan masyarakat; Perkampungan Sosial Pingit; sukarelawan.

PARTICIPATORY COMMUNICATION STRATEGIES OF VOLUNTEERS IN A COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM AT PERKAMPUNGAN SOSIAL PINGIT YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the participatory communication strategies employed by volunteers in a community empowerment program at Perkampungan Sosial Pingit (PSP), Yogyakarta, a community-based social service entity that has endured for nearly six decades without formal program structures or fixed funding. This research employs a qualitative approach using a single instrumental case study method. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with six informants comprising volunteers, accompanying Jesuit brothers (frater), and assisted residents, complemented by non-participant observation and a document study of the Instagram account @pingit_berbagi. Data credibility was established through source triangulation, while data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The study is grounded in Servaes' (2002) theory of

participatory communication and Cangara's (2014) circular model of communication planning. The findings show that PSP volunteers' communication strategy consistently fulfills four indicators of participatory communication: heteroglossia, realized through communicators' adaptive roles across the community's diversity; dialogic communication, built through proactive and routine presence as a foundation of trust; polyphony, manifested in weekly deliberations that accommodate diverse voices without homogenizing them; and carnival, which creates an informal and enjoyable space for participation for both children and adults. In addition, these four indicators are underpinned by the Ignatian pedagogical framework of preparation, action, and evaluation/reflection, which is structurally aligned with Cangara's circular model, with weekly formative evaluation serving as the main driver sustaining the participatory communication cycle.

Keywords: *community empowerment; Ignatian pedagogy; participatory communication; Perkampungan Sosial Pingit; volunteer.*

Korespondensi: Theresia Verani Peregrina. Universitas Negeri Yogyakarta. Jl. Colombo No.1, Karangmalang, Yogyakarta. Kode Pos. 55281 Email: theresiaverani.2022@student.uny.ac.id

PENDAHULUAN

Pascareformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pembangunan melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Pergeseran paradigma tersebut tidak hanya mengubah sistem tata kelola pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik, tetapi juga mendorong lahirnya pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Dalam praktiknya, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai proses yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah (top-down), melainkan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun demikian, implementasi partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi yang terjadi sering kali bersifat administratif atau formalitas sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat maupun menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan (Ntou et al., 2025).

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), tetapi sebagai pelaku utama perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu maupun komunitas agar mampu mengenali permasalahan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan mereka sendiri. Paradigma ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari capaian

fisik atau ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu membangun kesadaran kritis, memperkuat relasi sosial, serta mempertahankan keberlanjutan program setelah intervensi berakhir.

Komitmen pemerintah terhadap pendekatan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional. Salah satu kebijakan yang cukup berpengaruh adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan sebagai strategi nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Evaluasi yang dilakukan World Bank (2012) menunjukkan bahwa PNPM berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat modal sosial, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Setelah berakhirnya PNPM pada tahun 2014, pemerintah melanjutkan semangat pemberdayaan melalui kebijakan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pendekatan *bottom-up* tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Muminah & Suprajogo, 2025).

Selain pemerintah, berbagai organisasi nonpemerintah (*Non-Governmental Organizations* atau NGO) juga memiliki kontribusi penting dalam praktik pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Berbagai lembaga seperti Yayasan Bina Swadaya, Rumah Zakat, maupun Dompot Dhuafa mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan kapasitas masyarakat (Suharto, 2005). Beragam praktik tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pendidikan berkualitas, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan (United Nations, 2015).

Meskipun demikian, implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan belum merata dan sering kali tidak mampu menciptakan keberlanjutan setelah program selesai dilaksanakan. Sugiharti dkk. (2023) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial dan administrasi menyebabkan proses pemberdayaan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas komunikasi

antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga partisipasi warga lebih banyak bersifat simbolik daripada substantif.

Temuan serupa dikemukakan oleh Muslim (2017) yang meneliti implementasi PNPM Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegagalan program dalam membangun kemandirian masyarakat dipengaruhi oleh munculnya fenomena *partisipasi semu* (*pseudo participation*), yaitu kondisi ketika masyarakat tampak dilibatkan dalam berbagai forum musyawarah, namun proses pengambilan keputusan sebenarnya masih didominasi oleh elite desa maupun tokoh masyarakat. Akibatnya, aspirasi masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya terakomodasi dalam penyusunan program. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi fasilitator menyebabkan proses pendampingan tidak berjalan secara optimal. Sebagian fasilitator lebih berorientasi pada pencapaian target administratif dibandingkan membangun relasi sosial dan proses pembelajaran bersama masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, kebijakan, maupun struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang terbangun antara para aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persoalan tersebut dapat dipahami melalui pendekatan komunikasi partisipatif (*participatory communication*). Servaes dan Malikhao (2005) menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif berkembang sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan modernisasi yang bersifat *top-down*, karena model tersebut cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima informasi tanpa memberikan ruang yang cukup bagi keterlibatan aktif masyarakat. Sebaliknya, komunikasi partisipatif menempatkan dialog, kesetaraan, serta proses pertukaran makna sebagai fondasi utama pembangunan. Melalui komunikasi yang dialogis, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, pengalaman, serta pengetahuan lokal yang dimiliki sehingga pembangunan menjadi lebih kontekstual dan berkelanjutan (Servaes, 2002).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang justru mampu bertahan dalam jangka waktu panjang. Salah satu contoh yang menarik adalah Perkampungan Sosial Pingit (PSP) di Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Frater Alfred (Maret 2026), PSP lahir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan sosial pasca-peristiwa 1965 yang ditandai oleh tingginya jumlah gelandangan dan masyarakat miskin di kawasan perkotaan Yogyakarta. Inisiatif tersebut diprakarsai oleh Bernhard Kieser, seorang frater Jesuit, yang mengembangkan pendekatan pemberdayaan berbasis relasi kemanusiaan. Berbeda dengan berbagai program

sosial yang berorientasi pada bantuan sesaat, PSP sejak awal menempatkan relasi antarmanusia sebagai fondasi utama dalam proses pendampingan masyarakat (Katolikana.com, 2022).

Dalam perkembangannya, PSP tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelayanan sosial, tetapi berkembang menjadi komunitas pemberdayaan masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan secara berkelanjutan. Aktivitas yang dijalankan meliputi pendampingan anak melalui kegiatan pendidikan informal, pendampingan keluarga prasejahtera, pemberian akses terhadap layanan dasar, kegiatan kesehatan, pertunjukan budaya, hingga berbagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin oleh sukarelawan yang direkrut setiap tahun dan didasarkan pada relasi sosial yang dibangun bersama masyarakat. Keberagaman aktivitas tersebut menunjukkan bahwa PSP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material masyarakat, tetapi juga membangun modal sosial, rasa saling percaya, serta jejaring komunitas yang menjadi fondasi keberlanjutan program.

Hal yang menjadikan PSP menarik untuk dikaji adalah pola komunikasi yang dibangun oleh para sukarelawan. Berbeda dengan berbagai program pemberdayaan yang bergantung pada fasilitator profesional maupun struktur organisasi formal, keberlangsungan PSP justru ditopang oleh sukarelawan yang secara periodik mengalami regenerasi. Meskipun demikian, keberlanjutan program tetap dapat dipertahankan selama hampir enam dekade. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat strategi komunikasi tertentu yang memungkinkan proses pemberdayaan terus berlangsung meskipun pelaksana program terus berganti. Kondisi ini memperkuat pandangan Servaes (2008) bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat lebih ditentukan oleh kualitas relasi sosial, komunikasi yang dialogis, dan keterlibatan masyarakat dibandingkan aspek struktural maupun pendanaan semata.

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat umumnya masih berfokus pada program yang diinisiasi oleh lembaga formal, baik pemerintah, NGO, maupun institusi pendidikan. Satriani, Muljono, dan Lumintang (2022) menemukan bahwa keberhasilan Program Posdaya sangat dipengaruhi oleh komunikasi partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Pratama dan Wahyuningsih (2025) menunjukkan bahwa komunikasi yang empatik dan kontekstual menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendampingan kesehatan jiwa berbasis komunitas. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menempatkan fasilitator profesional sebagai aktor utama komunikasi. Kajian mengenai strategi komunikasi yang dijalankan oleh sukarelawan nonprofesional dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada strategi komunikasi partisipatif sukarelawan sebagai aktor utama dalam program pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas dan berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana sukarelawan menyampaikan pesan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana mereka membangun dialog, kepercayaan, partisipasi, serta relasi sosial yang memungkinkan program tetap berlangsung lintas generasi sukarelawan. Dengan menggunakan teori komunikasi partisipatif Servaes (2002) dan model lingkaran perencanaan komunikasi Cangara (2014), penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi partisipatif sukarelawan dalam program pemberdayaan masyarakat di Perkampungan Sosial Pingit Yogyakarta serta mengidentifikasi mekanisme komunikasi yang menopang keberlanjutan program tersebut.

LANDASAN TEORI

Effendy (2009) mendefinisikan strategi komunikasi sebagai kombinasi antara perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management) yang berorientasi pada komunikasi agar pesan bermakna sesuai kondisi dan kebutuhan penerimanya. Cangara (2014) mengembangkan model lingkaran perencanaan komunikasi yang terdiri atas enam tahap berkelanjutan, yaitu analisis audiens dan kebutuhannya, penetapan sasaran komunikasi, rancangan strategi pesan dan saluran, penetapan manajemen objektif, implementasi, serta evaluasi formatif dan sumatif. Keenam tahap tersebut tidak berjalan linear, melainkan membentuk siklus berulang dengan evaluasi sebagai alat kontrol. Cangara (2014) juga mengklasifikasikan strategi komunikasi menjadi lima jenis, yaitu informasional, persuasif, edukatif, partisipatif, serta adaptif dan kontekstual, yang dipilih berdasarkan konteks dan tujuan komunikasi yang hendak dicapai.

Servaes (2002) menempatkan komunikasi partisipatif sebagai proses interaktif yang memungkinkan pertukaran makna setara antara komunikator dan komunitas, bukan sekadar penyampaian pesan searah. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan model modernisasi top-down yang mengabaikan konteks lokal (Servaes & Malikha, 2005). Servaes (2002) merumuskan empat indikator komunikasi partisipatif. Pertama, heteroglasia, yaitu pengelolaan keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi komunitas tanpa mendominasi satu perspektif. Kedua, dialogis, yaitu komunikasi timbal balik yang mengakui setiap individu sebagai subjek otonom dengan kesempatan setara untuk berbicara dan didengar. Ketiga, poliponi, yaitu kondisi ketika berbagai suara berbeda tetap dipertahankan tanpa diseragamkan sehingga menjadi kekuatan kolektif. Keempat, karnaval, yaitu ruang komunikasi

informal dan inklusif yang diwujudkan melalui cerita, permainan, dan humor sehingga partisipasi tumbuh tanpa batasan formal. Keempat indikator ini menjadi kerangka analisis utama untuk mengidentifikasi strategi komunikasi partisipatif sukarelawan PSP pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal instrumental (Coombs, 2022; Creswell, 2013), yang bertujuan memahami secara mendalam satu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian dilaksanakan di Perkampungan Sosial Pingit, Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, selama April hingga Juni 2026. Sumber data primer dipilih secara purposif berbasis kriteria (Patton, 2015), terdiri atas dua sukarelawan aktif, dua frater pendamping Kolsani Kotabaru, dan dua warga penerima manfaat program pemberdayaan PSP (lihat Tabel 1). Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah relevan serta unggahan akun Instagram @pingit_berbagi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi-terstruktur mendalam (Herdiansyah, 2015), observasi nonpartisipan pada dua kesempatan berbeda, serta studi dokumen. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (Kriyantono, 2014) dengan membandingkan hasil wawancara antarnarasumber dan hasil observasi lapangan. Analisis data mengikuti tiga tahap Moleong (2002), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan berulang untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai strategi komunikasi partisipatif sukarelawan PSP.

Tabel 1. Data Narasumber Penelitian

Inisial	Peran dan Lama Keterlibatan
LC	Sukarelawan Divisi Anak (4 tahun)
MC	Sukarelawan Divisi Warga (3 tahun)
TB	Frater Pendamping Sukarelawan (2 tahun)
WH	Frater Pendamping/Koordinator PSP (2 tahun)
SR	Warga Dewasa Penerima Manfaat
CI	Anak Dampingan (Kelas 6 SD)

Sumber: Data primer diolah (2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSP merupakan entitas pelayanan sosial yang dikelola frater Jesuit Kolsani Kotabaru, berdiri sejak 1966 dan memperoleh payung hukum Yayasan Sosial Soegijapranata pada 1968. PSP menjalankan dua program mingguan, yaitu program anak-anak (Senin, pukul 19.00-20.00 WIB) untuk jenjang TK hingga SMP, serta program warga dampingan bagi keluarga

prasejahtera dengan masa dampingan maksimal dua tahun disertai evaluasi berkala. Sukarelawan direkrut terbuka setiap Januari tanpa syarat agama tertentu dan dibagi ke dalam divisi anak dan divisi warga di bawah koordinasi frater pendamping. Setiap Kamis malam, seluruh sukarelawan berkumpul di Kolsani Kotabaru untuk sesi preparasi, bagian dari siklus pedagogi Ignatian (preparasi, aksi, evaluasi/refleksi) yang menjadi kerangka kerja operasional PSP sejak awal berdiri.

Keberagaman komunitas PSP bersifat berlapis. Pada kelompok anak, terdapat perbedaan jenjang usia dan kondisi keluarga; pada kelompok warga dewasa, profesi dan permasalahan hidup sangat beragam, mulai dari pengamen hingga pekerja serabutan. Sukarelawan merespons keberagaman ini bukan melalui homogenisasi, melainkan diferensiasi relasional yang disengaja. Terhadap anak SD besar, sukarelawan memosisikan diri sebagai teman diskusi yang setara; terhadap anak TK, sebagai figur otoritas yang hangat; sementara terhadap remaja SMP yang kritis, sukarelawan bersedia menerima protes dan perdebatan. Terhadap warga dewasa, frater pendamping memosisikan diri sebagai “teman seperjalanan”, bukan konselor maupun birokrat sosial.

Diferensiasi ini bukan kemampuan spontan individual, melainkan hasil formasi awal berupa kegiatan circle atau retreat yang secara sengaja membangun empati lintas latar belakang sebelum sukarelawan terjun ke lapangan. Keberagaman agama juga dikelola secara hati-hati, ditunjukkan oleh tidak adanya isu kristenisasi meskipun pengelola program adalah frater Jesuit. Temuan ini sejalan dengan penegasan Effendy (2009) bahwa komunikator efektif harus menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi dan latar belakang komunikan, sekaligus memperkuat kajian Sari et al. (2024) pada Pokdarwis Desa Wisata Pela mengenai pentingnya pengelolaan keberagaman dalam komunikasi partisipatif berbasis komunitas. Berbeda dari konteks tersebut, keberagaman yang dihadapi PSP mencakup dimensi usia, ekonomi, budaya, dan agama secara simultan, sehingga strategi adaptif dan kontekstual (Cangara, 2014) menjadi keharusan struktural, bukan sekadar pilihan.

Temuan menunjukkan bahwa dialog di PSP tidak dibangun secara reaktif menunggu masalah muncul, melainkan melalui kehadiran proaktif dan rutin setiap minggu meski tidak ada persoalan mendesak. Kehadiran yang konsisten inilah yang secara bertahap membangun keakraban dan kepercayaan, sehingga warga merasa cukup aman untuk membicarakan persoalan ekonomi, konflik antarwarga, maupun kekhawatiran terhadap anak. Frater pendamping memosisikan diri bukan sebagai pihak yang menyelesaikan seluruh persoalan warga, melainkan sebagai penemani yang memastikan warga tidak menghadapi kesulitan sendirian.

Sifat dialogis ini juga terwujud dalam relasi dengan anak-anak, yang diberi ruang mengajukan permintaan kegiatan untuk pertemuan berikutnya, serta dalam pengelolaan situasi krisis komunitas, seperti keluhan keamanan yang direspons melalui evaluasi bersama dan tindak lanjut konkret, alih-alih keputusan sepihak. Koordinasi dialogis juga melibatkan jalur formal kelembagaan melalui Ketua RT/RW untuk perizinan dan koordinasi kegiatan. Temuan ini memperkuat kajian Kurnia (2024) mengenai pentingnya komunikasi dua arah yang dialogis dan konsultatif, namun menemukan hal yang lebih mendasar, yaitu bahwa prasyarat dialog bermakna bukanlah teknik komunikasi yang baik saat masalah terjadi, melainkan kehadiran proaktif rutin yang membangun fondasi kepercayaan sebelum masalah itu muncul.

Poliponi di PSP terwujud paling nyata dalam mekanisme perencanaan kegiatan setiap Kamis malam, ketika tidak ada pihak yang berhak menentukan materi secara sepihak. Diskusi berlangsung terbuka antara sukarelawan dan frater pendamping, termasuk melibatkan suara anak-anak melalui permintaan kegiatan yang mereka ajukan. PSP mendengarkan semua suara, namun keputusan tetap diambil melalui pertimbangan bersama, bukan atas dominasi satu pihak, sejalan dengan penegasan Servaes (2002) bahwa keberagaman suara yang sehat berarti semua suara didengar tanpa harus diikuti secara seragam.

Ujian terbesar poliponi di PSP adalah pergantian pelaku: sukarelawan berganti setiap tahun dan frater pendamping setiap dua tahun, namun program tetap berjalan hampir enam dekade. Frater pendamping berperan sebagai penjaga koherensi nilai, bukan penyeragam suara, sehingga setiap generasi sukarelawan justru diharapkan membawa perspektif baru. Pada level eksternal, poliponi juga tampak dari keterlibatan RT/RW dan Dinas Sosial sebagai pemangku kepentingan yang suaranya diperhitungkan dalam keberlangsungan PSP. Temuan ini memperkuat kajian Setiawan dan Setiawan (2024) mengenai efektivitas pendekatan bottom-up dalam komunikasi partisipatif, dengan catatan bahwa di PSP, bottom-up bukan sekadar aliran informasi, melainkan prinsip struktural dalam setiap pengambilan keputusan.

Strategi karnaval di PSP bukan pelengkap program, melainkan strategi utama yang membuka partisipasi bagi mereka yang tidak akan terlibat melalui jalur formal. Pada program anak, hal ini diwujudkan melalui aktivitas bermain, outing class, dan bercerita, termasuk permintaan cerita horor yang menunjukkan kebebasan anak menentukan agenda percakapan mereka sendiri. Kegembiraan yang dirasakan anak bukan efek samping program, melainkan program itu sendiri, sejalan dengan prinsip penyusunan pesan Effendy (2009) yang menekankan kesesuaian pesan dengan karakteristik audiens.

Pada warga dewasa, karnaval hadir melalui kegiatan kolektif seperti buka bersama Ramadan, tirakatan, peringatan hari ulang tahun Pingit, dan kunjungan tamu mancanegara.

Respons spontan warga terhadap momen-momen tersebut lebih banyak berbicara tentang kegembiraan dan perluasan jaringan sosial ketimbang dampak program secara formal, memperkuat pandangan Widodo (2012) bahwa kampung kota seperti Pingit berfungsi sebagai “laboratorium sosial” tempat pemberdayaan tumbuh melalui kegiatan sosial informal. Dimensi karnaval juga berfungsi sebagai mekanisme bertahan bagi sukarelawan sendiri: keterlibatan yang bertahan hingga empat tahun, jauh melampaui masa komitmen umum satu tahun, ditopang oleh kegembiraan berkomunikasi, bukan semata struktur program formal.

Keempat indikator komunikasi partisipatif tersebut ditopang oleh satu mekanisme operasional, yaitu siklus pedagogi Ignatian yang terdiri atas preparasi (Kamis malam di Kolsani Kotabaru), aksi (Senin malam, pukul 19.00-20.00 WIB), dan evaluasi/refleksi yang dilakukan segera setelah aksi berakhir. Siklus ini dikombinasikan dengan prinsip cura personalis, yaitu perhatian menyeluruh terhadap setiap pribadi, misalnya melalui penelusuran aktif ketika seorang anak absen tiga kali berturut-turut. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa siklus tiga tahap ini selaras secara struktural dengan keenam tahap model lingkaran Cangara (2014), sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tahap analisis audiens diwujudkan melalui cura personalis yang bersifat kontinu, bukan asesmen formal sesekali. Tahap penetapan sasaran komunikasi dibentuk melalui dialog dengan warga dan anak, bukan ditetapkan sepihak. Tahap rancangan strategi pesan dan saluran terwujud dalam sesi preparasi Kamis yang mengintegrasikan informasi bottom-up dari wali kelas, misalnya laporan kondisi kelas yang bocor. Tahap manajemen objektif tercermin dari pembagian divisi anak dan warga dengan wali kelas sebagai jalur komunikasi. Tahap implementasi berlangsung disiplin setiap Senin, didukung kunjungan personal di luar sesi formal. Tahap evaluasi formatif dan sumatif dijalankan melalui refleksi rutin setelah aksi, yang hasilnya langsung menjadi bahan preparasi berikutnya.

Tabel 2. Keselarasan Pedagogi Ignatian dengan Model Lingkaran Cangara (2014)

Tahap Cangara (2014)	Wujud dalam Pedagogi Ignatian PSP
Analisis audiens	Cura personalis yang berkelanjutan
Penetapan sasaran	Dialog perumusan tujuan bersama warga/anak
Rancangan strategi	Preparasi Kamis (pesan dan saluran)
Manajemen objektif	Divisi anak/warga dan wali kelas
Implementasi	Aksi Senin 19.00-20.00 dan kunjungan personal
Evaluasi formatif/sumatif	Refleksi pascaaksi, menjadi bahan preparasi berikutnya

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2026).

Di antara keenam tahap tersebut, evaluasi formatif tampak paling menonjol karena berjalan mingguan, jauh lebih responsif dibandingkan program sosial pada umumnya yang

baru mengevaluasi tiap kuartal atau tahun. Evaluasi formatif inilah yang menjadi jembatan yang menghidupkan siklus lingkaran Cangara, karena hasil refleksi Senin malam langsung menjadi bahan preparasi Kamis berikutnya. Temuan ini memperluas model Cangara (2014) yang semula berorientasi pada perencanaan tunggal organisasi formal, menjadi model terdistribusi antara pelaksanaan lapangan sukarelawan dan sistem pendukung institusional frater pendamping.

SIMPULAN DAN SARAN

Strategi komunikasi partisipatif sukarelawan PSP secara konsisten memenuhi keempat indikator Servaes (2002): heteroglasia melalui penyesuaian peran komunikator, dialogis melalui kehadiran proaktif yang membangun kepercayaan, poliponi melalui musyawarah mingguan yang mengakomodasi keberagaman suara, dan karnaval melalui ruang partisipasi informal yang menyenangkan. Keempat indikator tersebut tidak berdiri sendiri sebagai keterampilan individual sukarelawan, melainkan ditopang oleh kerangka pedagogi Ignatian berupa preparasi, aksi, dan evaluasi/refleksi yang berjalan mingguan, dikombinasikan dengan prinsip cura personalis. Siklus tersebut secara struktural selaras dengan keenam tahap model lingkaran perencanaan komunikasi Cangara (2014), dengan evaluasi formatif sebagai tahap paling menonjol karena menjadi penggerak utama keberlanjutan siklus komunikasi partisipatif PSP hingga hampir enam dekade.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas model Cangara (2014) dari perencanaan tunggal organisasi formal menjadi model terdistribusi antara strategi komunikasi lapangan sukarelawan dan sistem pendukung institusional. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya sistem pendukung di balik kerja lapangan relawan, seperti formasi awal, forum evaluasi berkala, dan mekanisme regenerasi terstruktur, agar kualitas komunikasi partisipatif tidak bergantung pada ketokohan individu, melainkan dapat direproduksi lintas generasi sukarelawan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah tunggal dan perspektif pelaku yang aktif pada periode penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan studi kasus jamak dengan melibatkan sukarelawan purnatugas dan warga yang telah mandiri, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif, seperti tingkat retensi warga dampingan, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas strategi komunikasi partisipatif terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

REFERENSI

Cangara, H. (2014). *Perencanaan dan strategi komunikasi*. RajaGrafindo Persada.

- Coombs, H. (2022). Penelitian studi kasus: Tunggal atau beberapa [White paper]. *Southern Utah University*.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE.
- Effendy, O. U. (2009). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek* (Cetakan ke-22). PT Remaja Rosdakarya.
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Kurnia, D. (2024). Analisis komunikasi partisipatif dalam penanganan bullying pada remaja oleh Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia Kabupaten Bogor [Skripsi, Universitas PTIQ Jakarta].
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan bottom-up. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1485-1495.
- Muslim, A. (2017). Analisis kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14524>
- Ntou, M. R., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2025). Transformasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa atas penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara Kabupaten Boalemo. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(1), 66.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE.
- Sari, R., Rohmah, A. N., & Nurliah. (2024). Komunikasi partisipatif Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam pengembangan ekowisata Desa Wisata Pela. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 12(2).
- Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R. W. E. (2022). Komunikasi partisipatif pada program Pos Pemberdayaan Keluarga. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 9(2). <https://doi.org/10.46937/20202240185>
- Servaes, J. (2002). *Communication for development: One world, multiple cultures* (2nd ed.). Hampton Press.
- Servaes, J., & Malikhao, P. (2005). Participatory communication: The new paradigm? In O. Hemer & T. Tufte (Eds.), *Media and glocal change*. CLACSO.
- Setiawan, H. D., & Setiawan, B. (2024). Strategi komunikasi pembangunan Andromeda Learning Center dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Yogyakarta. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 99.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. PT Refika Aditama.
- Widodo, J. (2012). Urban kampung in Yogyakarta: Community resilience in urban transformation. *Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India*, 1(1), 45-58. https://doi.org/10.24517/jurci.1.1_45.